

UMKM SUMSEL EXPO DI BANDUNG

Pengunjung melihat produk umkm yang dipasarkan pada acara UMKM Sumatera Selatan Expo Hari Nasional UMKM 2022 di Ciampelas Walk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/8). Sejumlah produk kerajinan, tekstil hingga kuliner asal Sumatera Selatan dipasarkan pada acara tersebut yang bertujuan sebagai wadah promosi, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di pasar nasional.



FOTO/ANT

Pemerintah Percepat Penyelesaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Wahyu Utomo menyampaikan, Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran agar dapat segera memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia di lingkup lokal maupun nasional.

JAKARTA (IM) - Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, Pemerintah terus melakukan upaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih luas lagi, keberadaan PSN sekaligus juga diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) terus berperan untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan program PSN serta mengevaluasi usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN.

Dalam melaksanakan per-

an tersebut, KPIIP menggelar pertemuan yang membahas Rencana Aksi 13 Proyek yang disertakan dalam PSN sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, pada Jumat (5/8) dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), serta sejumlah Badan Usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan bahwa pembahasan tersebut juga untuk menjalankan arahan Presiden pada Rapat Internal 25 April

2022 lalu.

"Arahannya yaitu untuk PJPK PSN baru, yang masuk dalam Permenko Nomor 9 Tahun 2022 perlu menyampaikan beberapa hal penting, antara lain mengenai rencana aksi proyek sampai tahun Semester I-2024, milestone proyek per tahun, dan isu-isu kritis yang perlu ditindaklanjuti," ujar Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana KPIIP, dilansir dari laman Kemenko Perekonomian, Jumat (12/8).

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan, Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran agar dapat segera memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia di lingkup lokal maupun nasional. "Rencana aksi, pencapaian, dan tindak lanjut isu perlu segera dilengkapi oleh Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional sebagai dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang harus dilakukan," tutur Wahyu.

Ke-13 PSN baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia terdiri dari berbagai sektor yakni sektor teknologi seperti proyek Palapa Ring Integrasi, kemudian di sektor perkebunan seperti proyek Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya yang terletak di Papua Barat.

Untuk sektor Air Bersih dan Sanitasi terdapat proyek Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II yang berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk sektor pariwisata terdapat Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Sedangkan, untuk sektor kereta api yaitu Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur.

Sementara itu untuk sektor kawasan terdapat proyek pembangunan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Untuk bendungan terdapat pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh di Aceh.

Di sektor energi terdapat pembangunan PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau serta di sektor pangan terdapat Integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo dan SupportingCo.

Dalam PSN baru ini juga terdapat tiga proyek smelter yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi Sulawesi Tengah, Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala Sulawesi Tenggara, dan Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur Maluku Utara. "Smelter Nikel di Maluku Utara bertujuan untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia," kata Wahyu. • **hen**

Pemerintah Kantongi Rp7,65 Triliun dari Pajak Digital

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga Juli 2022 pemerintah berhasil mengantongi Rp7,65 triliun dari peneanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Perdagangan yang Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE).

Nilai itu berasal dari 121 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN ke kas negara. Adapun pemungutan PPN PMSE ini sudah berjalan sejak Juli 2020. "Total seluruh PPN yang di-collect dari PMSE adalah Rp7,65 triliun," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (12/8).

Sri Mulyani merinci, sepanjang Juli-Desember 2020, pemerintah berhasil mengantongi Rp730 miliar dari pungutan PPN

PMSE. Kemudian berlanjut di sepanjang Januari-Desember 2021 realiasi PPN PMSE mencapai Rp3,9 triliun.

Sedangkan untuk sepanjang Januari-Juli 2022 tercatat pemerintah sudah mengantongi PPN PMSE sebesar Rp3,02 triliun. Sehingga secara total keseluruhan penerimaan negara dari PPN PMSE mencapai Rp7,65 triliun.

"Jadi ini ada suatu kenaikan yang sangat tinggi, karena baru separuh tahun saja (Januari-Juli 2022) sudah di atas Rp3 triliun," ungkapnya.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, negara telah mengantongi Rp88,93 miliar dari pajak kripto hingga Juli 2022. Pajak kripto ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2022 lalu. Ia merinci, realisasi penerimaan pajak kripto

itu berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp42,60 miliar. Serta berasal dari pajak kripto juga berasal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan senilai Rp25,11 miliar.

"Sejak berlaku 1 Mei 2022, mulai dibayarkan dan dilaporkan Juni 2022, ini penerimaan pajak kripto berasal dari PPh 22 sebesar Rp 42,60 miliar dan PPN DN Rp 46,33 miliar," ujar Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan, ke depan pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. • **pan**

PLN Jalin Kolaborasi dengan Pelindo

JAKARTA (IM) - PT PLN (Persero), melalui anak usaha PT Haleyora Power menjalin kolaborasi dengan PT Pelindo Jasa Maritim, sub-holding PT Pelindo untuk memperkuat pasokan listrik di pelabuhan milik Pelindo. Langkah ini sejalan dengan program PLN dalam Electrifying Marine.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta belum lama ini. Melalui nota kesepahaman ini, PLN Group nantinya akan memperkuat pasokan listrik di pelabuhan milik Pelindo Group.

Direktur Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan, dengan pasokan listrik yang andal di pelabuhan, diharapkan bisa mendorong konversi penggunaan BBM untuk operasional kapal menjadi berbasis listrik.

"PLN mendorong pemanfaatan listrik yang lebih luas khususnya di pelabuhan. Melalui Electrifying Marine mampu menekan ketergantungan penggunaan BBM. Dengan adanya penandatanganan MoU ini, kami optimistis akan menguatkan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif," kata Didi, dalam siaran pers, Jumat (12/9).

PLN Group melalui anak usahanya PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) juga menekan MoU dengan Pelindo Jasa Maritim untuk memaksimalkan rantai pasok batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Group.

Didi mengatakan, sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber

daya yang dimiliki masing-masing perusahaan. Yakni dari Bahtera Adhi Guna yang bergerak di bidang transportasi batu bara untuk pengamanan pasokan batu bara ke PLTU dengan Pelindo Jasa Maritim yang bergerak di bidang pelayanan jasa kapal, pemeliharaan dan penyediaan peralatan pelabuhan serta layanan fasilitas pelabuhan.

Didi menjelaskan, dengan adanya nota kesepahaman ini, nantinya ketiga perusahaan akan bekerja sama mengembangkan usaha di bidang pengerukan dan tug assist.

Ia melihat kolaborasi ini penting karena bisnis pelayaran merupakan bisnis yang terintegrasi. Sehingga membutuhkan kolaborasi antar BUMN untuk memaksimalkan potensinya.

"Sumber daya kolektif nanti akan kita konsolidasikan, kita kerja bersama, dan harapannya bisa dikembangkan bisnisnya. Tinggal infrastrukturnya dibikin andal. Jangan sampai mengecewakan konsumennya," jelas Didi.

Direktur Investasi Pelindo Boy Robyanto menyambut baik MoU dengan PLN ini dan mendorong untuk segera dibentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini perlu dilanjutkan utamanya untuk optimalisasi pengurangan biaya logistik. Terutama untuk pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur," ujar Boy. • **dro**



IDN/ANT

KERAJINAN BERBAHAN KULIT

Perajin Faried Wardhana membuat tempat korek api dari kulit di Wasik D'Savior Vintage Culture, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/8). Kerajinan berbahan dari kulit seperti gantungan kunci, dompet, gelang, tempat gelas, tempat korek dan lain-lain itu dipasarkan ke sejumlah daerah dengan harga Rp200.000 sampai Rp800.000 tergantung model produk kerajinannya.



Menperin Apresiasi Industri Otomotif

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan ekspansi industri otomotif melalui berbagai upaya. Bersama para pelaku industri, dalam setahun terakhir Kemenperin berupaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan perluasan pasar ekspor kendaraan dengan menggunakan berbagai perjanjian perdagangan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi regional untuk semua jenis kendaraan.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian dan kontribusi para produsen kendaraan, komponen, suku cadang yang telah mendukung perkembangan industri otomotif tanah air serta pertumbuhan perekonomian nasional dengan membawa masuk devisa dari ekspor ke lebih dari 80 negara. Mereka adalah 'pahlawan devisa' kita," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan GIIAS Power Dinner di Jakarta, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Jumat (12/8).

Dalam setahun terakhir, berbagai capaian telah ditunjukkan oleh industri otomotif. Di antaranya, pertumbuhan yang luar biasa hingga 7,35% pada kuartal kedua tahun 2022, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri yang mencapai 4,33%.

Saat ini terdapat 21 industri perakitan kendaraan roda 4 atau lebih, dengan total investasi Rp140 triliun. Dari investasi tersebut, 83,3% berasal dari Jepang, 7,5% dari Korea Selatan, dan 8,1% dari Republik Rakyat Tiongkok.

"Sedangkan sisanya berasal dari Uni Eropa dan penanaman modal dalam negeri," kata Agus.

Dari sisi komersial, ekspor otomotif Indonesia telah mencapai lebih dari 80 negara. Termasuk, baru-baru ini, membuka pasar ke Australia yang terkenal memiliki spesifikasi yang ketat. Agus juga mengapresiasi peningkatan jumlah model kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Ia berharap dengan meningkatnya pilihan model kendaraan akan menambah tawaran model untuk pasar ekspor.

Namun demikian, di samping pencapaian selama setahun terakhir, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif. Beberapa tantangan di antaranya kekurangan bahan baku, masalah semi-konduktor, logistik dan transportasi, juga biaya energi yang tinggi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu untuk mengembangkan sayap untuk menjangkau pasar-pasar baru, mengukuhkan inovasi, serta meningkatkan anggaran research & development (R&D).

Menurut Agus, hal ini akan menjadi basis bagi Kemenperin dalam memperjuangkan insentif untuk industri otomotif. "Inovasi serta ketersediaan bahan baku merupakan kunci bagi masa depan industri otomotif," tegas Agus.

Kemenperin dan para stakeholder juga berupaya memastikan bahwa proses produksi industri otomotif dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal ketersediaan bahan baku.

"Kami juga meminta komitmen para pelaku industri otomotif untuk meningkatkan kandungan produk lokal, baik suku cadang maupun komponen, dalam proses manufaktur," kata Agus. • **pan**

PNBP dari Dividen BUMN Capai Rp37,91 Triliun

JAKARTA (IM) - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Kurnia Chairi menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) telah mencapai Rp37,91 triliun sampai Juli 2022.

"Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 juga meningkat, maka setoran dividen yang kita terima sudah tumbuh 24 persen dibandingkan 2021," kata Kurnia dalam "Taklimat Media" secara daring di Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (12/8).

Pada periode yang sama 2021, PNBP dari dividen tercatat senilai Rp30,50 triliun atau turun 32 persen dari penerimaan pada 2020 yang senilai Rp44,6 triliun. "Di 2021, memang karena dipengaruhi tingkat profitabilitas di 2020, PNBP dari dividen BUMN turun cukup dalam," terangnya.

Adapun pada 2020, pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak Ma-

ret mengakibatkan penerimaan dividen dari BUMN turun 12 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp50,63 triliun.

Adapun penentuan besar dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kebutuhan rencana pengembangan BUMN, dan pengusutan pemerintah.

"Kami masih mengumpul, menginventarisir, dan memvalidasi berbagai dokumen RUPS (rapat umum pemegang saham) yang sudah disampaikan kepada kami untuk bisa menentukan kapan penyetoran dividen jatuh tempo, nanti akan kami tagihkan," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga akan terus bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan BUMN tidak lupa menyetorkan dividen. "Terkadang ada BUMN yang lupa melaporkan, sehingga kami tidak mendapatkan informasi sudah ada RUPS yang membagikan dividen. Jadi upaya tersebut kami terus lakukan dan koordinasikan dengan Kementerian BUMN," ucapnya. • **dot**